

PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM BIDANG POLITIK
INTERNASIONAL JEPANG PERIODE 1982-1987

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sastra



Disusun oleh:

DEVI DAMAYANTY

NIM: 08110058

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Devi Damayanty

NIM : 08110058

Program Studi : Sastra Jepang S1

Judul Skripsi : PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM BIDANG
POLITIK INTERNASIONAL JEPANG PERIODE 1982-1987

Telah disetujui oleh pembimbing, pembaca dan Ketua Jurusan Sastra Jepang S1 untuk diajukan di hadapan Dewan Penguji pada hari Senin, 25 Februari 2013 pada program Studi Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Pembimbing : Syamsul Bachri, SS, M.Si

Pembaca : Yessy Harun, SS, M.Pd

Ketua Jurusan : Hari Setiawan, M.A

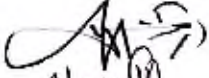
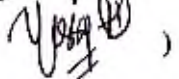

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari:

Pembimbing : Syamsul Bachri, SS, M.Si ()
Pembaca : Yessy Harun, SS, M.Pd ()
Ketua Penguji : Dra. Yuliasih Ibrahim ()

Disahkan pada hari senin, 25 Februari 2013.

 Ketua Program Studi,

Hari Setiawan, M.A

 Dekan Fakultas Sastra,

FAKULTAS SAstra
Syamsul Bachri, M.Si

ABSTRAKSI

Nama : Devi Damayanty
NIM : 08110058
Program Studi : Sastra Jepang
Judul : PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM BIDANG
POLITIK INTERNASIONAL JEPANG PERIODE 1982-1987

Berdasarkan sistem politik Jepang yang dijelaskan oleh penulis, perdana menteri merupakan salah satu kesatuan yang penting dalam pemerintah, termasuk di Jepang.

Berdasarkan masalah yang ada pada bidang politik Internasional Jepang periode 1982-1987, penulis mencoba menerangkan perjalanan karier salah satu tokoh yang berhubungan erat dengan politik Internasional Jepang dari tahun 1982-1987, tokoh tersebut adalah Yasuhiro Nakasone.

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai peranan Yasuhiro Nakasone dalam bidang politik Internasional Jepang periode 1982-1987, karena Yasuhiro memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan politik Internasional Jepang saat Yasuhiro menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang.

Kata kunci :

Yasuhiro Nakasone

概要

- 氏名 : デヴィ・ダマヤンチ
- 学生番号 : 08110058
- 学科 : 文学部日本語学科
- 題名 : 1982年から1987年までの日本政治における中曾根康弘の役割

筆者が説明した日本政治のシステムによると、首相が大事な統一政府役割を果すのは当然だ。

1982年から1987年まで日本の国際政治に問題があったことによって、筆者は1982年から1987年までの日本の国際政治について人物の説明することを試してみる、中曾根康弘人物である。

この研究は、筆者が中曾根康弘は首相に担当したときの日本の国際政治の発展に大きな影響があったので、1982年から1987年までの日本の国際政治における中曾根康弘の役割について討論する。

キーワード :

中曾根 康弘

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Yasuhiro Nakasone Dalam Bidang Politik Internasional Jepang Periode 1982-1987” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syamsul Bachri, M.Si selaku Dekan Fakultas Sastra dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yessy Harun M.Pd selaku dosen pembaca yang sedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi serta memberikan saran dan masukan.
3. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku ketua sidang yang telah memberikan banyak saran kepada penulis.
4. Bapak Hermansyah Djaya, M.A sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama masa perkuliahan sampai masa pembuatan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan dan Para Dosen Fakultas Sastra Jepang.
6. Kepada orang tua saya, Ayahanda, H.Sudanto, yang selalu memberi motivasi pada saat saya mulai putus asa. Ibunda, Hj.Yuni Susilawati, yang telah sepenuh hati dan raga merawat dan mendukung saya hingga saat ini, dan adik-adikku (novita sari dan M.farhan dani) serta keluarga Elmira Azalia Prasetyo yang telah memberikan perhatian dan dukungan doa.
7. Sahabat-sahabat saya (ria lestari, dani prasetyo, niken noviandini, dyna aprilianti, abdul rahman, ilmi rizky, deka laksamana, arry aryanto, kresna adi, anggih satria, nadya novalia, ahmad firdaus) yang telah memotivasi

dan menghibur saat saya menemukan hambatan dalam penulisan skripsi ini.

8. Rizki, yang selalu menemani dan mendukung dalam proses pencarian data maupun saat penulisan skripsi.
9. Teman-teman terkasih serta seperjuangan angkatan 2008 dari awal kelas perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Harapan penulis adalah untuk dapat memberikan manfaat bagi yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis,

Devi Damayanty

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Landasan Teori.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.8 Manfaat Penelitian.....	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II RIWAYAT HIDUP YASUHIRO NAKASONE	13
2.1 Sejak Lahir sampai berprestasi di bangku SMA Shizuoka.....	13

2.2	Keberhasilan di Universitas Tokyo.....	16
2.3	Bergabung dengan Angkatan Laut, Sebagai Letnan Pengganti.....	18
2.4	Perjalanan karier ke Dunia Politik.....	20
2.5	Rekontruksi Nasional.....	23
2.6	Menjelang Kepemimpinannya.....	25
BAB III PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM PERPOLITIKAN JEPANG.....		29
3.1	Pengangkatan sebagai Perdana Menteri.....	29
3.2	Pemimpin Partai Liberal Demokrat dan Perdana Menteri Jepang.....	32
3.3	Kunjungan Perdana Menteri Yasuhiro ke Kuil Yasukuni.....	42
3.4	Pertahanan Jepang.....	44
3.5	Akhir Masa Jabatan Perdana Menteri Yasuhiro.....	47
BAB IV KESIMPULAN.....		49
DAFTAR PUSTAKA.....		51
GLOSARIUM.....		53
LAMPIRAN		

ABSTRAKSI

Nama : Devi Damayanty
NIM : 08110058
Program Studi : Sastra Jepang
Judul : PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM BIDANG
POLITIK INTERNASIONAL JEPANG PERIODE 1982-1987

Berdasarkan sistem politik Jepang yang dijelaskan oleh penulis, perdana menteri merupakan salah satu kesatuan yang penting dalam pemerintah, termasuk di Jepang.

Berdasarkan masalah yang ada pada bidang politik Internasional Jepang periode 192-1987, penulis mencoba menerangkan perjalanan karier salah satu tokoh yang berhubungan erat dengan politik Internasional Jepang dari tahun 1982-1987, tokoh tersebut adalah Yasuhiro Nakasone.

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai peranan Yasuhiro Nakasone dalam bidang politik Internasional Jepang periode 1982-1987, karena Yasuhiro memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan politik Internasional Jepang saat Yasuhiro menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang.

Kata kunci :

Yasuhiro Nakasone

概要

- 氏名 : デヴィ・ダマヤンチ
- 学生番号 : 08110058
- 学科 : 文学部日本語学科
- 題名 : 1982年から1987年までの日本政治における中曾根康弘の役割

筆者が説明した日本政治のシステムによると、首相が大事な統一政府役割を果すのは当然だ。

1982年から1987年まで日本の国際政治に問題があったことによって、筆者は1982年から1987年までの日本の国際政治について人物の説明することを試してみる、中曾根康弘人物である。

この研究は、筆者が中曾根康弘は首相に担当したときの日本の国際政治の発展に大きな影響があったので、1982年から1987年までの日本の国際政治における中曾根康弘の役割について討論する。

キーワード :

中曾根 康弘

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Landasan Teori.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.8 Manfaat Penelitian.....	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II RIWAYAT HIDUP YASUHIRO NAKASONE	13
2.1 Sejak Lahir sampai berprestasi di bangku SMA Shizuoka.....	13

2.2	Keberhasilan di Universitas Tokyo.....	16
2.3	Bergabung dengan Angkatan Laut, Sebagai Letnan Pengganti.....	18
2.4	Perjalanan karier ke Dunia Politik.....	20
2.5	Rekontruksi Nasional.....	23
2.6	Menjelang Kepemimpinannya.....	25
BAB III PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM PERPOLITIKAN JEPANG.....		29
3.1	Pengangkatan sebagai Perdana Menteri.....	29
3.2	Pemimpin Partai Liberal Demokrat dan Perdana Menteri Jepang.....	32
3.3	Kunjungan Perdana Menteri Yasuhiro ke Kuil Yasukuni.....	42
3.4	Pertahanan Jepang.....	44
3.5	Akhir Masa Jabatan Perdana Menteri Yasuhiro.....	47
BAB IV KESIMPULAN.....		49
DAFTAR PUSTAKA.....		51
GLOSARIUM.....		53
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada awal masuk tahun 1970, Jepang adalah negara yang pemerintahannya banyak memiliki konflik daripada kesepakatan yang dicapai bersama, meskipun sebagian sudah dapat teratasi oleh lamanya pemerintahan konservatif. Sebagian besar konflik yang terdapat pada masa itu tetap tidak terpecahkan, walaupun ada usaha untuk memecahkan konflik ini. Dengan demikian, dalam politik Jepang selalu ada ketegangan yang tampak jelas, tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang sudah nampak begitu stabil. (Stockwin, 1984: 4-5)

Pada tahun 1889 Undang-Undang Dasar Meiji disahkan, dan pada tahun 1890, Parlemen Kekaisaran bersidang untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1899 dibuatlah perjanjian internasional dengan negara-negara Barat, yang menempatkan Jepang sejajar dengan negara-negara Barat. Era ini ditandai dengan tumbuhnya kapitalisme dan tersebar luasnya paham demokrasi.

Namun kekalahan Jepang dalam perang dunia II, mengakhiri militerisme dan fasisme Jepang, disusul dengan pendemokrasian oleh pendudukan sekutu, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Sebagai simbol demokrasi, munculah Undang-undang Dasar Negara Jepang tahun 1947. Sejak itu, mulailah berlaku institusi politik modern Amerika disebut dengan konstitusi Jepang.

Kabinet-kabinet partai politik, terutama Partai Liberal Jepang yang terbentuk pada tahun 1955, merupakan tulang punggung pelaksana mekanisme demokrasi sistem parlementer. Pertarungan partai-partai yang ada di Jepang merupakan bukti nyata terjadinya demokrasi di Jepang.

1.1 Sistem Politik Jepang

Perdana Menteri Jepang secara kelembagaan merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, tetapi konstitusi Jepang menetapkan bahwa kekuasaan Eksekutif ada di tangan kabinet dan bukan di tangan Perdana Menteri. Hal ini mengartikan bahwa penyelenggara atau pelaksana pemerintahan di Jepang adalah kabinet dan bukan Perdana Menteri. Kabinet yang secara kolektif harus bertanggungjawab kepada parlemen atau Diet.

Perdana Menteri kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan politiknya selaku kepala eksekutif, tetapi sebagai tokoh kepala pemerintahan, ia hanya mempunyai peran yang sangat menentukan dalam menangani berbagai percaturan politik di dalam negeri maupun interaksinya dengan politik luar negeri. Tidak ada aktor politik lain selain seorang perdana menteri yang memiliki kemampuan mobilisasi berbagai kementerian dan lembaga Negara untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional Jepang.

Menurut Budiarto, Perdana Menteri adalah Badan Eksekutif. Badan Eksekutif terdiri dari kepala Negara seperti Raja atau Presiden, beserta menteri-menterinya. Perdana Menteri bertugas melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan badan legislatif serta menyelenggarakan Undang-undang yang dibuat oleh legislatif. (Budiarto, 1977:79)

Di Jepang menganut sistem parlementer sehingga para kabinet dipimpin langsung oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dilantik oleh kaisar setelah dipilih oleh parlemen Jepang. Perdana Menteri sebagai ketua kabinet bertugas untuk melantik dan memberhentikan para menteri.

Menurut Mangadaram, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen atau Diet dan Perdana Menteri sendiri adalah anggota parlemen atau Diet. Perdana Menteri adalah seseorang yang mengepalai sebuah kabinet dalam sebuah Negara dengan sistem

parlementer. Perdana Menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya. (1979:159)

Menurut Budiarto (1977:187-188), Perdana Menteri sebagai pemimpin Negara memiliki kekuasaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Diplomatik | : Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain. |
| Administratif | : Melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi Negara. |
| Militer | : Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan Negara. |
| Yudikatif | : Amnesti. |
| Legislatif | : Merencanakan rancangan Undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-undang. |

Pada abad ke-20, Jepang memiliki 2 UUD yang saling bertentangan. UUD Meiji tahun 1889 merupakan suatu UUD yang pada akhirnya gagal untuk mengarahkan jalan menuju kestabilan sosial maupun ekonomi yang berdampak pada politik Jepang. Tetapi UUD 1947 atau yang dibuat oleh pemerintahan pendudukan Amerika justru membawa angin baru tersendiri, dengan adanya kestabilan pemerintah, negara, ekonomi dan sosial. Dari perspektif tahun 1970-an, susah untuk dibayangkan bahwa betapa sulitnya memecahkan masalah politik Jepang yang berkepanjangan, sedikit demi sedikit seiring berjalanya waktu, pemerintahan Jepang dijalankan sesuai dengan mempertahankan status quo. Konstitusi Jepang memberi ciri dan citra kepada konstitusi sebagai "*Heiwa Kenpo*" (konstitusi Perdamaian) dan kepada negara Jepang sebagai "*Heiwa Kokka*" (Negara Perdamaian). Selanjutnya dapat diperhatikan bahwa nama atau sebutan untuk masa pemerintahan kaisar sekarang adalah "Heisei" yang berarti adalah "*Achieving Peace*" (mencapai perdamaian). (Sudjiman, 1998: 86)

Menurut konstitusi baru, Jepang adalah negara monarki konstitusional dengan kaisar sebagai lambang atau simbol Negara dan persatuan Rakyat. (*The Constitution of Japan, Chapter 1-Emperor, Article 1*). Konstitusi baru selanjutnya menetapkan antara lain bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sistem pemerintahannya adalah sistem kabinet parlementer (Diet) dengan parlemen yang terdiri dari “*shugi-in*” (Majelis Rendah) dan “*sangi-in*” (Majelis Atas). Konstitusi menjamin hak-hak dasar individu menurut paham demokrasi liberal, menghapus golongan bangsawan dan menghapus pula perbedaan antara hak-hak pria dengan wanita. Partai politik terbesar adalah “*Jiyu Minshuto*” (Liberal Democratic Party/Partai liberal Demokrat) yang mempunyai mayoritas kursi dan suara di “*shugi-in*” dan berperan sebagai partai pemerintahan sejak tahun 1955.

(Sudjiman, 1998: 86)

Pertengahan zaman Showa, seiring dengan pembentukan Partai Liberal Demokrat (LDP) pada tahun 1955, membuat elite politik makin kuat untuk bersaing menjadi penguasa nomor satu di Jepang. Pembentukan Partai Liberal Demokrat pada tahun 1955 ini merupakan suatu pencapaian politik yang pengaruhnya sangat besar dalam dunia perpolitikan Jepang. Pengaruhnya yang paling nyata dan secara umum dapat diterima adalah tegaknya stabilitas politik selama suatu periode yang panjang bila dibandingkan dengan partai-partai yang berdiri di tahun 1920-an dan 1930-an serta keadaan pada tahun 1945-an, jelas keadaan politik di zaman pertengahan Showa ini merupakan langkah pertama yang cukup menguntungkan meski tak lepas dari berbagai permasalahan politik. (Yoshihumi, 1998: 4). Secara umum sebenarnya Jepang pada saat itu, pemerintahannya memegang sistem politik partai tunggal, tetapi sejak adanya partai oposisi yang merupakan perpecahan dari partai-partai tunggal tadi menjadikan sistem partai politik di Jepang menjadi sistem dwi partai. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengkritik utama terhadap partai yang duduk di pemerintahan atau bagi partai yang menang. Sistem dwi partai ini pernah disebut sebagai “*a convenient system for contented people*”, yang maksudnya adalah komposisi masyarakat homogen, dan adanya perjalanan sejarah serta azas dan tujuan sosial yang kuat. (Budiarjo, 1972: 169)

Universitas Darma Persada

Setelah perang dunia II, pejuang-pejuang Jepang yang telah melawan Amerika tidaklah didukung oleh bangsanya sendiri, justru mereka dikecam karena membuat Jepang porak-poranda. Justru merekalah yang disebut "*penjahat perang*". Jepang memprotes keras adanya militer di Jepang, tetapi justru ada salah seorang perdana menteri yang mulai menjabat pada tahun 1982, Yasuhiro, yang ingin membangun kembali kemiliteran Jepang sebagai bentuk pertahanan, tetapi hal ini dikritik keras oleh bangsa Jepang. Menurutnya, suatu negara harus memiliki pertahanan (*Self Defense*) bagi keutuhan bangsanya, suatu kekalahan atau kehancuran bukanlah menjadi suatu masalah justru menjadi pelajaran bagi negaranya itu sendiri. Oleh karena itu pejuang-pejuang Jepang yang dianggap sebagai penjahat perang dimakamkan di suatu tempat yang diberi nama "*Yasukuni Jinja*" atau "*Kuil Yasukuni*", yang menjadi suatu polemik politik juga bagi negara Jepang serta bagi Yasuhiro yang mendapat kritikan keras mengenai pendapatnya tentang *Yasukuni*. Pada tanggal 15 Agustus 1985, Perdana Menteri Yasuhiro selaku pimpinan anggota kabinet Jepang pada waktu itu, mengadakan ziarah ke *Yasukuni Jinja*, yaitu kuil Shinto, tempat persemayaman arwah yang gugur dalam perang dunia I dan perang dunia II. Peristiwa itu menimbulkan reaksi rakyat Jepang, yang menganggap perbuatan pemerintah itu bertentangan dengan hukum atau konstitusi, yang menegaskan bahwa adanya pemisahan antara negara dan agama. Ziarah ke kuil Shinto seperti *Yasukuni Jinja* ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat negara dalam kedudukannya yang resmi. Memperhatikan semua itu, Perdana Menteri Yasuhiro memberikan pengumuman yang menyatakan bahwa ia tidak akan berziarah lagi ke kuil Yasukuni sebagai kunjungan resmi kenegaraan. (Sudjiman, 1998: 72)

Terpilihnya Yasuhiro sebagai pimpinan baru Jepang pada tahun 1982, yang menggantikan *Suzuki Zenko* ini memiliki dampak terhadap perkembangan politik internasional terutama hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan juga kawasan Asia Pasifik. Jepang berada di sisi Amerika Serikat dalam percaturan politik Internasional sejak Perang Dingin dan orientasi dasar ini akan diteruskan oleh Yasuhiro yang telah mengatakan bahwa hubungan Jepang-Amerika Serikat akan tetap mendasari politiknya.

Akan tetapi kita harus memperhatikan manifestasi politik Yasuhiro yang dikenal sebagai tokoh politik kontroversial itu. (Tjeng, 1983: 123)

Yasuhiro yang lahir pada tanggal 27 Mei 1918 ini, merupakan anak laki-laki ke-2 dari ke-6 bersaudara, ayah dari Yasuhiro bernama Matsugoro II, yang merupakan generasi ke-16 setelah Yasuhiro Jurou. Sedangkan ibunya bernama Yuku, putri terakhir dari keluarga *Nakamura*. Kesungguhan Yasuhiro dalam menggeluti dunia politik, sepertinya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, dengan didikan ayahnya yang disiplin ia selalu bersikap patuh, hormat, jujur, itulah yang menandakan kelak ia akan menjadi salah satu penguasa nomor satu di negeri matahari tersebut. (Yasuhiro, 1999: 1-2)

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang menitikberatkan pada peranan Yasuhiro dalam bidang politik di Jepang periode 1982-1987, antara lain:

- Perkembangan Politik di Jepang saat Yasuhiro menjabat sebagai Perdana Menteri
- Keberhasilan Yasuhiro menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dalam dua periode
- Kemajuan hubungan diplomatik antara Jepang dengan negara-negara lain
- Perkembangan ekonomi Jepang selama menjabat sebagai Perdana Menteri

3. Pembatasan Masalah

Pembahasan mengenai tentang perjalanan karier Yasuhiro dalam memasuki dunia politik internasional di Jepang. Pada tahun 1982, pada saat Yasuhiro mulai menjabat Perdana Menteri periode 1982-1987

4. Rumusan Masalah

Negara Jepang merupakan negara yang memiliki SDM yang kompeten sehingga melahirkan seorang tokoh bangsa yang berperan memperjuangkan nama negara yang ia cintai dimata dunia internasional. Salah satunya adalah seorang tokoh yang sangat berperan penting dalam perkembangan negara Jepang yaitu Yasuhiro. Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Peranan Yasuhiro dalam bidang politik internasional periode 1982-1987.

Maka penulis akan membahas beberapa masalah sebagai berikut:

- 4.1 Bagaimana perjalanan karier Yasuhiro dalam memasuki dunia politik di Jepang sampai ia terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang ?
- 4.2 Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Yasuhiro selama menjabat sebagai Perdana Menteri ?
- 4.3 Bagaimana hubungan Jepang dengan negara-negara lain semasa Yasuhiro menjadi Perdana Menteri Jepang ?
- 4.4 Alasan apa yang menyebabkan Yasuhiro terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang dalam dua Periode ?

5. Tujuan Penelitian

Sebagian masyarakat hanya menganalisis kelembagaan suatu Negara dan melupakan peran individu yang berada di belakangnya, oleh karena itu penulis mengambil tema tersebut dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana cara Yasuhiro memulai kariernya dalam dunia politik Jepang sampai ia terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang, lalu mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan selama Yasuhiro menjabat sebagai Perdana Menteri dalam bidang politik maupun ekonomi. Sehingga memajukan hubungan dengan negara-negara lain serta faktor apa yang menyebabkan Yasuhiro bisa menjabat sebagai Perdana Menteri dalam dua periode.

6. Landasan Teori

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan beberapa konsep pemerintahan serta gaya kepemimpinan yang dapat di gunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

6.1 Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13).

Sementara itu pemerintahan mempunyai 2 arti, yaitu Pemerintah dalam *arti luas* dan *arti sempit*.

Pemerintahan dalam *arti luas* :

Menurut Van Poeljoe (1966) Pemerintahan dalam arti luas ialah sebagai fungsi yakni meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat Pemerintahan untuk mencapai tujuan Pemerintah.

Pemerintahan dalam *arti sempit* :

Van Poeljoe (1966) mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti sempit ialah, sebagai bahan pelengkap Negara yang disertai perintah. Kemudian Ndraha, mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. (2000:70)

Kaufman mengungkapkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (1995:101)

6.2 Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari hal itulah timbul pemikiran dan kebutuhan untuk dipimpin dan memimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias.

(David, Keith, 1985).

Menurut Rivai, dalam buku "*Kepemimpinan dan Dua*".

- 1) Kepemimpinan adalah "Sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk seseorang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela."
- 2) Kepemimpinan adalah "Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas- aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok." (Rivai, 1999 : 23)

Sedangkan menurut Bennis, dalam buku *Reinventing Leadership*, Kepemimpinan ialah :

Saya pikir seorang presiden besar, seperti pemimpin besar mana pun juga lainnya, paling sedikit harus mempunyai tiga hal. Pertama, rangkaian keyakinan yang kuat. Kedua, peserta yang penuh pengabdian. Ketiga, kemampuan menggunakan kedudukannya sebagai mimbar untuk mendapatkan dukungan luas bagi tujuannya. Semua kriteria ini adalah apa yang diperlukan pemimpin di tingkat nasional, dan wawasan ini adalah diperlukan organisasi di tingkat nasional.

(Bennis, 2009: 56)

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Newstrom yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan (1995). Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.

(Husnan, 2002:224).

Sedangkan menurut Tjiptono (2001:161), gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004:29).

Menurut Tanjung, (2003 : 35-36) mengemukakan empat (4) gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, antara lain :

1. Kepemimpinan Demokrasi, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
2. Kepemimpinan Mutlak, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan kesediaan menerima segala resiko apapun.
3. Kepemimpinan Paternalisme, yakni bentuk gaya kepemimpinan pertama (demokrasi) dan kedua (diktator) diatas, yang dapat diibaratkan dengan sistem diktator yang berselamatkan demokratis.

(Bennis, 2009: 56)

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Newstrom yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan (1995). Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.

(Husnan, 2002:224).

Sedangkan menurut Tjiptono (2001:161), gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004:29).

Menurut Tanjung, (2003 : 35-36) mengemukakan empat (4) gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, antara lain :

1. Kepemimpinan Demokrasi, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.

2. Kepemimpinan Mutlak, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan kesediaan menerima segala resiko apapun.

3. Kepemimpinan Paternalisme, yakni bentuk gaya kepemimpinan pertama (demokrasi) dan kedua (diktator) diatas, yang dapat diibaratkan dengan sistem diktator yang berselimutkan demokratis.

4. Kepemimpinan Bebas Terkendali, yakni gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan pengoprasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditentukan oleh atasan mereka.

Dikemukakan bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. (Blanchard,1992).

7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Studi pustaka yang digunakan ialah menelaah berbagai buku, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan Yasuhiro, baik berupa buku fisik ataupun buku elektronik (eBook). Sebagian besar bahan yang digunakan, penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Darma Persada, Perpustakaan Nasional dan Internet. Dalam penulisan ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan data-data dari berbagai buku yang isinya berkaitan dengan subjek penulisan.

8. Manfaat penulisan

Berdasarkan metode penelitian, penulis berharap dapat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengetahui sejarah perpolitikan di Jepang dan juga ingin mengetahui tentang perjalanan karier Yasuhiro dalam dunia politik hingga menjadi Perdana Meteri Jepang dan bagaimana peranan seorang Yasuhiro dalam bidang politik Internasional periode 1982-1987.

9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan menguraikan pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan pada setiap bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan latar belakang yang berkaitan dengan sejarah politik pada zaman pertengahan Showa. Disamping itu dalam bab ini juga terdapat identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, landasan teori, metode penulisan, manfaat penulisan dan sistem penulisan.

BAB II RIWAYAT HIDUP YASUHIRO NAKASONE

Pada Bab ini, penulis ingin membahas tentang latar belakang kehidupan dan keluarga Yasuhiro Nakasone serta menjelang kariernya sebagai Perdana Menteri Jepang Periode 1982-1987.

BAB III PERANAN YASUHIRO NAKASONE DALAM PERPOLITIKAN JEPANG

Pada Bab III ini, penulis ini akan memaparkan dan menganalisis peranan Yasuhiro dalam bidang politik dan ekonomi, dampak dan manfaat yang dialami masyarakat Jepang selama pemerintahan Yasuhiro sebagai Perdana Menteri Jepang dan pro-kontra yang dialami Yasuhiro pada saat pemerintahannya .

BAB IV KESIMPULAN